

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 5) Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan “Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional”.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 9) pengertian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Menurut peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) No.78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa “Sekolah bertaraf internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari Negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan sekolah nasional yang sama dengan sekolah pada umumnya di Indonesia, namun Sekolah Bertaraf Internasional memadukan dan mengimplementasikan dua kurikulum (nasional dan internasional) dengan maksud akan menghasilkan lulusan yang bersertifikasi secara internasional.

B. Landasan Hukum Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut panduan penyelenggaraan program rintisan SMA bertaraf internasional, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 4) menyebutkan landasan hukum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pasal 50 ayat (2) ; Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, kemudian ayat (3) ; Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kab/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 tahun 2006.

Landasan kebijakan/landasan hukum merupakan aturan-aturan berdasarkan Undang-undang, peraturan-peraturan pemangku kepentingan, maupun aturan yuridis resmi lain yang berlaku dan digunakan pada suatu Negara dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peraturanyang menguatkan dilaksanakannya sebuah program yang dianggap penting atau mendesak untuk segera diselenggarakan dan selaras dengan program-program lain yang telah ada dan saling berkesinambungan atau terkait. Dengan adanya landasan kebijakan/hukum maka diharapkan program yang akan diselenggarakan tidak bertentangan dengan garis besar Negara dan mendapatkan persetujuan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

C. Visi dan Misi Sekolah Bertaraf Internasional

Dalam sebuah lembaga/organisasi, menentukan visi sangat penting sebagai arahan dan tujuan yang akan dicapai. Sebaliknya misi juga penting karena merupakan pengembangan dari rencana program suatu lembaga/organisasi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 12-13), visi dan misi Sekolah Bertaraf Internasional sebagai berikut :

1. Visi SMA bertaraf internasional, yaitu mencirikan wawasan kebangsaan, memberdayakan seluruh potensi kecerdasan dan meningkatkan daya saing global perlu dijabarkan ke dalam misi SMA bertaraf internasional. Contoh misi yang menjabarkan visi tersebut di atas misalnya berbunyi "Berdasarkan visi tersebut di atas maka (nama sekolah) memiliki komitmen untuk (1) menjaga keutuhan NKRI, (2) membekali dan membina siswa dalam hal budi pekerti luhur dan terpuji sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, (3) memberdayakan potensi kecerdasan siswa baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) maupun iman dan taqwa (IMTAQ) dalam meningkatkan daya saing secara internasional.
2. Misi yang telah dijabarkan tersebut akan dijadikan dasar rujukan dalam menyusun dan mengembangkan rencana programkegiatan yang memiliki indicator SMART, yaitu (*Specific*), dapat diukur

(*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), dapat dilaksanakan (*Realistic*), dan ditentukan batas waktunya (*Time Bound*). Misi ini direalisasikan melalui kebijakan, rencana, program, dan kegiatan SMA bertaraf internasional yang disusun secara cermat, tepat, futuristik, dan berbasis *demand-driven*.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, diharapkan arah pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional selaras dengan arah pembangunan pendidikan di Indonesia serta harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya yang masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Negara lain, khususnya di kawasan asia. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Fokus utama yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan intitusi sekolah sebagai basis utama pendidikan, baik aspek manajemen, sumber daya manusianya, maupun sarana dan prasarananya. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah agar perubahan dan perkembangan tersebut dapat direspon dengan cepat adalah dengan meningkatkan kualitas mutu sekolah dengan mengembangkan sekolah bertaraf internasional.

D. Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional

Dengan adanya penjaminan mutu Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan orang tua siswa bisa lebih mempercayakan putra-putrinya kepada sekolah untuk memperoleh mutu pendidikan yang terukur karena persyaratan minimal untuk menyelenggarakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional yaitu diantaranya melalui pedoman

penjaminan mutu ini. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 91 Ayat menyatakan bahwa :

- Ayat (1): Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- Ayat (3): Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional ini disusun untuk memberikan penjelasan dan ketentuan secara umum bagi para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Sekolah/Madrasah dalam menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan:

1. Memiliki persepsi yang sama tentang penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang efektif, efisien, dan inovatif;
2. Menjabarkan secara operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Sekolah/Madrasah bertaraf internasional; dan
3. Melaksanakan seluruh proses penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional mulai dari kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporannya.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 9), penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 9) mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu perolehan sertifikat akreditasi minimal "predikat A" dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Sekolah dengan memperoleh "predikat A" pada setiap periode akreditasi berarti bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu pendidikan secara optimal.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 9) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi yang baik dari badan akreditasi sekolah pada salah satu negara anggota *Organization for Economic and Co-operation Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

2. Kurikulum

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 9-10) Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan

tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut:

- a. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- b. Menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK;
- c. Memenuhi Standar Isi; dan
- d. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 10) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- a. Sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing;
- b. Muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; dan
- c. Menerapkan standar kelulusan sekolah/madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

3. Proses Pembelajaran

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 10) mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Proses.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 10) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- a. Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneurial, jiwa patriot, dan jiwa inovator;
- b. Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
- c. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran;
- d. Pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia; dan
- e. Pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada Kelas IV.

Dalam proses pembelajaran selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum internasional, seperti bahasa Perancis, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

4. Penilaian

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 11) mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan menunjukkan kinerja pendidikan yang optimal melalui penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh para guru untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi standar penilaian.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu memperkaya penilaian kinerja pendidikan dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota Organization for Economic and Co-operation Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

5. Pendidik

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 12) mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan guru yang menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas profesionalnya. Pendidik memiliki peranan yang strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi standar pendidik.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 12), keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- a. Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK;
- b. Guru mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris;
- c. Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SD/MI;
- d. Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/MTs; dan
- e. Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK.

Guru dalam proses pembelajaran sepanjang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhannya, selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum internasional, seperti bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

6. Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 12) mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan kepala sekolah/madrasah yang menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas profesionalnya, yaitu sebagai pemimpin manajerial-administratif dan pemimpin manajerial-edukatif. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 13) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah/Madrasah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
- b. Kepala Sekolah/Madrasah mampu berbahasa Inggris secara aktif; dan
- c. Kepala Sekolah/Madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan *entrepreneurial* yang kuat.

7. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 13) mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan kewajiban sekolah/madrasah memiliki dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Dengan memenuhi seluruh standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan diharapkan sekolah tetap mengedepankan kualitas proses pembelajaran agar sarana dan prasarana yang telah dimiliki dapat dipergunakan secara optimal dan dapat dipelihara sebaik-baiknya oleh pihak sekolah sesuai dengan standar yang ada.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 13) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK;
- b. Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia; dan
- c. Dilengkapi dengan ruang multimedia, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 100-103) menjelaskan bahwa pada tahap mandiri diharapkan sarana dan prasarana Sekolah Bertaraf Internasional memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Tanah dengan luas minimal 15.000 m²
- b. Ruang kelas dengan kapasitas 32 orang siswa
- c. Perpustakaan Ruang baca yang cukup memadai.

- d. Pengembangan laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan IPS.
- e. Laboratorium komputer
- f. Kantin
- g. Auditorium
- h. Fasilitas Olahraga
- i. Pusat Belajar dan Riset Guru (TRRC)
- j. Penunjang administrasi sekolah
- k. Poliklinik Sekolah
- l. Toilet
- m. Tempat bermain, kreasi, dan rekreasi.
- n. Tempat beribadah

8. Pengelolaan

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 14) mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pengelolaan.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 14) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- a. Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya ISO 14000;
- b. Merupakan sekolah/madrasah multi-kultural;
- c. Menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri;
- d. Bebas narkoba dan rokok;
- e. Bebas kekerasan (*bullying*);
- f. Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah; dan
- g. Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.

9. Pembiayaan

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 14) mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pembiayaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pembiayaan.

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 14) keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target Indikator Kunci Tambahan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) No. 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Pasal 13 menjelaskan pembiayaan pendidikan Sekolah Bertaraf Internasional sebagai berikut:

- Ayat (1): Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Ayat (2): Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI.
- Ayat (3): SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya atas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
- Ayat (4): Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- Ayat (5): Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan

- SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
- Ayat (6): Pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat.
- Ayat (7): Masyarakat dapat memberikan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional diperlukan pedoman penjaminan mutu yang dapat dipergunakan sekolah sebagai acuan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam pedoman penjaminan mutu tersebut agar nantinya dapat benar-benar diakui sebagai sekolah yang telah menggunakan standar dalam penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Pada mutu terkandung dua unsur yaitu kriteria dan pengukuran. Kriteria berkenaan dengan batas minimal yang harus dicapai atau target yang diharapkan. Pengukuran adalah serangkaian proses untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan kondisi nyata.

Pengakuan Sekolah Bertaraf Internasional dapat diperoleh apabila sekolah dapat memenuhi seluruh standar yang digunakan dalam pedoman penjaminan mutu Sekolah Bertaraf Internasional serta telah melaksanakan dan memenuhi delapan unsur Standar Nasional Pendidikan sebagai indikator kinerja minimal ditambah dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OCED) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu

dalam bidang pendidikan sebagai indikator kinerja kunci tambahan, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan.

E. Karakteristik Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 7) yaitu, “Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional memiliki karakteristik keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek. Pengakuan Internasional ditandai dengan penggunaan standar pendidikan internasional dan dibuktikan dengan hasil sertifikasi berpredikat baik dari salah satu negara anggota *Organization for Economic and Co-operation Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan”.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 8-10), karakteristik Sekolah Bertaraf Internasional yaitu :

- a. Melatih peserta didik untuk disiplin dan bermotivasi tinggi agar mampu bersaing di dunia internasional.
- b. Menggunakan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang diperkaya dengan mengadaptasi kurikulum negara lain yang sudah maju dan atau kurikulum internasional.
- c. Mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik dengan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
- d. Menerapkan bidang ICT sebagai daya saing di dunia internasional.
- e. Menggunakan sistem pengelolaan pembelajaran satuan kredit semester (sks).
- f. Mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya Indonesia.
- g. Menyiapkan peserta didik menjadi warga dunia yang bangga terhadap budaya bangsanya mampu berpikir kritis dan holistik, memecahkan masalah, mandiri serta dapat berkerjasama dengan orang lain.

F. Pengertian, persyaratan, dan pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

1. Pengertian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 10), pengertian Rintisan SMA Bertaraf Internasional adalah SMA nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, menerapkan sistem kredit semester dan dalam proses menuju SMA bertaraf internasional (hanya salah satu strategi menyiapkan SBI).

2. Persyaratan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 8) Sekolah Menengah Atas yang dapat mengikuti program rintisan SMA bertaraf internasional harus memiliki kriteria minimal sebagai berikut:

- a. Sekolah Menengah Atas negeri atau swasta yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan terakreditasi A.
- b. Kepala sekolah memenuhi standar nasional pendidikan, berkompeten dalam pengelolaan manajemen mutu pendidikan, serta mampu mengoperasikan komputer, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- c. Memiliki tenaga pengajar fisika, kimia, biologi, matematika dan mata pelajaran lainnya yang berkompeten menggunakan ICT dengan pengantar bahasa Inggris
- d. Tersedia sarana prasarana yang memenuhi standar untuk menunjang proses pembelajaran bertaraf internasional antara lain:
 - 1) Memiliki tiga laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
 - 2) Memiliki perpustakaan yang memadai

- 3) Memiliki laboratorium computer
 - 4) Tersedia akses internet
 - 5) Memiliki web sekolah
 - 6) Memiliki kultur sekolah yang kondusif (bersih, bebas asap rokok, bebas kekerasan, indah, dan rindang)
- e. Memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan program rintisan SMA bertaraf internasional.
 - f. Penyelenggaraan sekolah dalam satu shift (tidak double shift).
 - g. Jumlah rombongan belajar pada satu satuan pendidikan minimal 9 (sembilan) atau setara dengan 288 siswa.
 - h. Memiliki lahan minimal 10.000 m²
 - i. Memiliki akses jalan masuk yang mudah dilalui oleh kendaraan roda empat.

3. Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 61) menyatakan bahwa, Pengembangan rintisan SMA bertaraf internasional berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional tanggal 27 Juli 2007 terdiri dari dua fase, yaitu fase rintisan dan fase kemandirian.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 61) fase rintisan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengembangan dan tahap konsolidasi. Tahap pengembangan berlangsung selama 3 tahun mencakup pengembangan kemampuan SDM, modernisasi manajemen dan kelembagaan. Tahap konsolidasi berlangsung selama 2 tahun, pada tahap ini sekolah diharapkan telah menemukan praktek-praktek yang baik (*the best practices*), inovasi serta

kreasi keunggulan yang mendukung pengembangan tahap berikutnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui diskusi secara terbatas dalam lingkungan sekolah maupun diskusi secara luas melalui loka karya atau seminar. Di samping itu, sekolah juga diharapkan telah menemukan kendala dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik selama fase rintisan.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009: 61) fase kemandirian dimulai pada tahun ke enam. Pada fase ini SMA bertaraf internasional diharapkan telah mampu bersaing secara internasional yang ditunjukkan dengan kemampuan yang tangguh dalam kurikulum, PBM, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan serta kepemimpinan. Diharapkan sekolah telah dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional. Dengan kata lain, sekolah bertaraf internasional telah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan bersaing di forum internasional. Indikasi bahwa sekolah bertaraf internasional telah mencapai fase kemandirian antara lain (1) tumbuhnya prakarsa sendiri untuk memajukan sekolah bertaraf internasional, (2) kemampuan berpikir dan kesanggupan bertindak secara kreatif dalam penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional, (3) kemantapan sebagai sekolah bertaraf internasional untuk bersaing di forum internasional.

G. Persepsi Orang Tua

1. Pengertian Persepsi

Persepsi terjadi setelah melalui beberapa tahap, proses terjadinya persepsi menurut Chaplin (Roso Sugiyanto, 2008: 15) dimulai dengan adanya perhatian, yaitu merupakan proses perhatian selektif di dalamnya mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui obyek-obyek serta kejadian-kejadian. Menurut Moskowitz (Roso Sugiyanto, 2008: 15), persepsi terjadi melalui beberapa langkah, yaitu: (1) *Gathering information*, (2) *Selection*, (3) *Mixing*, (4) *Organizing*, dan (5) *Interprating*. Maksud dari langkah-langkah tersebut adalah bahwa persepsi dimulai dari menghimpun atau mengumpulkan informasi yang masuk kemudian menyeleksi untuk memperoleh prioritas. Penyaringan dilakukan untuk melengkapi, mengurangi, atau mengkoordinasikan informasi. Selanjutnya, informasi tersebut diorganisasi untuk memberikan pandangan yang teratur sebelum diinterpretasikan. Pendapat lain mengenai proses terjadinya persepsi dikemukakan Bimo Walgito sebagai berikut:

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Namun proses itu tidak terhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan sebagainya. Individu mengalami persepsi. (Bimo Walgito, 2002: 69)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas diketahui bahwa persepsi didahului dengan adanya rangsangan atau stimulus berupa kejadian atau informasi dari lingkungan yang diterima oleh indera, tetapi tidak semua

rangsang tersebut mendapat respons. Suatu obyek akan menarik jika ada hubungannya dengan diri yang bersangkutan atau kepentingannya, obyek, kejadian, atau informasi tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku yang bersangkutan.

2. Peran Orang Tua

Peran orang tua mempunyai andil yang besar bagi maju atau tidaknya mutu pendidikan yang ada di lingkungannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan turut serta menunjang perkembangan masyarakat, oleh karena itu masyarakat membutuhkan sekolah dan turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sekolah. Pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting artinya bagi peningkatan dan kemajuan pendidikan nasional.

Istilah sekolah merupakan sebuah konsep yang luas, yang mencakup baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan nonformal. Sedangkan istilah masyarakat merupakan konsep yang mengacu pada semua individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada diluar sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga atau masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga (orang tua) dan masyarakat. Ini berarti bahwa orang tua murid dan masyarakat

mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 Tahun 2003 pada Bab IV bagian kedua pasal 7 menjelaskan bahwa ayat (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Seterusnya Ackerman dan Alscott dalam bukunya yang dikutip H.A.R Tilaar, menjelaskan bahwa orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah nasional merupakan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari pendidikan. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Mastuhu (2003: 168), bahwa masyarakat juga merupakan kontrol mutu pendidikan dan memberikan akreditasi mengenai kinerja dan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, melalui penilaian oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang terdiri dari murid, orang tua, tokoh masyarakat, ilmuwan, agamawan, industrialis, dan para pengguna jasa pendidikan terkait.

Persepsi orang tua mengenai suatu program kebijakan khususnya dalam pendidikan akan menentukan bagaimana keberlangsungan dari program kebijakan tersebut. Adanya *stimulus*/rangsangan berupa sosialisasi program kebijakan yang dilakukan sekolah akan diterima oleh orang tua sebagai sebuah persepsi atau dugaan sementara, biasanya setelahnya orang tua akan memberikan respon apabila program kebijakan tersebut dirasa menarik dengan

mengumpulkan informasi-informasi mengenai program kebijakan tersebut. Setelah dapat membayangkan dan mempersepsikan mengenai program kebijakan tersebut orang tua akan mempunyai harapan mengenai program kebijakan tersebut, karena dianggap menarik atau hal tersebut menyangkut kepentingannya.

Seperti halnya pada fenomena yang terjadi di SMA N 1 Kalasan, yaitu SMA N 1 Kalasan yang berada di pinggiran provinsi yogyakarta berubah statusnya dari SMA biasa menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional maka orang tua siswa ketika mendengarnya akan mempersepsikan sekolah RSBI sesuai informasi yang mereka miliki. Agar pihak sekolah dan orang tua mempunyai persepsi yang sama mengenai RSBI maka sekolah harus memberikan kegiatan sosialisasi kepada orang tua tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bahwa hal apa saja yang akan dilakukan sekolah untuk mendidik putra-putrinya.

3. Hubungan Masyarakat dan Sekolah

Masyarakat akan berpartisipasi secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada apa dan bagaimana sekolah melakukan pendekatan dalam rangka memberdayakan masyarakat sebagai mitra penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Hal ini ditegaskan oleh Brownell bahwa pengetahuan masyarakat tentang program merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan. Oleh sebab itu orang tua/masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan dan informasi dari sekolah tentang apa dan bagaimana mereka dapat membantu sekolah (seperti

halnya masih banyak terjadi pada daerah pedesaan), akan cenderung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu sekolah. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak terjalannya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah.

Menurut Dedy Achmad Kurniady (2005: 5), menjelaskan bahwa terkait pemberdayaan hubungan sekolah dengan masyarakat terdapat beberapa sumber-sumber yang dapat digali dari pihak masyarakat, antara lain:

1. Sumber Manusiawi
Orang-orang terkemuka/berpengaruh, cendekiawan, para ahli dengan keterampilan tertentu, orang dermawan dan sosiawan, dan sebagainya yang dapat memberikan bantuan/partisipasinya dalam proses pendidikan di sekolah.
2. Sumber Sosial
Berupa kelompok, organisasi, baik formal maupun informal dengan berbagai norma, peraturan kebiasaan-kebiasaan yang turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah.
3. Sumber Kebudayaan dan Agama
Dengan berbagai nilai hidup dan kehidupan, tradisi, ajaran, serta kebudayaan dan kesenian yang turut membina dan memperkaya pendidikan di sekolah.
4. Sumber Lingkungan Fisik
Keadaan alam dengan segala kekayaannya yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan di sekolah.
5. Sumber Materi Keuangan.
Yang datangnya secara formal dari pemerintah dan secara informal dari pihak-pihak lain dalam masyarakat.

Suatu wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta dapat menghubungkan komunikasi sekolah dengan masyarakat maupun sebaliknya yaitu komite sekolah. Menurut Depdiknas (2006: 9), Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan

dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah, menyebutkan bahwa keanggotaan komite sekolah dapat terdiri dari unsur masyarakat sebagai berikut :

1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. dunia usaha/industri;
 - e. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - f. wakil alumni;
 - g. wakil peserta didik.
2. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).

Berdasarkan Depdiknas (2006: 17), menjelaskan peran Komite Sekolah sebagai berikut:

Komite sekolah secara umum berperan, sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Kemudian disebutkan kembali menurut Depdiknas (2006: 17) dalam menjalankan perannya, secara umum Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. *Modul 1: Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah 18*
 - c. Penyusunan Reencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Kriteria Kinerja satuan pendidikan;
 - e. Kriteria tenaga kependidikan;
 - f. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - g. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

H. Motivasi Memilih Sekolah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang telah ada harus direspon dengan kemajuan pada bidang pendidikan agar nantinya siswa dapat memahami serta dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diterima pada bangku sekolah menjadi bekal kelak ketika telah lulus dari suatu sekolah serta dengan adanya pendidikan diharapkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang telah ada dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologididasari oleh karena semakin bertambah banyak dan bermacam-macam kebutuhan manusia. Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta semakin banyak dan beragam kebutuhan terutama pada bidang pendidikan pada saat ini direspon dengan semakin banyaknya jenis sekolah yang ada pada lingkungan masyarakat berada. Hal semacam ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara

opimal oleh masyarakat karena dengan adanya sekolah-sekolah tersebut masyarakat dapat memilih suatu sekolah yang benar-benar sesuai dengan keyakinan, kebutuhan, serta dapat mengembangkan bakat-bakat potensial yang telah dimiliki daerah di mana sekolah tersebut berada. Orang tua sebagai orang terdekat pada mobilitas lingkungan keluarga yang dapat memberikan pengarahan serta dapat memberikan pengaruh kepada putra-putrinya untuk bersekolah tentu harus dapat memberikan arahan dan memilihkan suatu sekolah dari sekian banyaknya jenis-jenis sekolah yang telah ada yang dinilai tepat dan sesuai dengan arah perkembangan jaman. Sangat penting bagi orang tua untuk benar-benar memahami dan mengenali potensi akademik yang dimiliki putra-putrinya agar nantinya tidak salah dalam menyekolahkan pada suatu sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki calon siswa, di bawah ini disampaikan beberapa hasil-hasil penelitian terkait dengan motivasi memilih sekolah.

Penelitian Fitriana Yulianti 2009 berjudul “Analisis Faktor-Faktor Motivasional Siswa Memilih SMKN 1 Pujon” mengungkapkan hasil penelitiannya sebagai berikut, ditemukan 12 faktor baru antara lain: (1) faktor menggapai cita-cita, (2) faktor kondisi fisik sekolah, (3) Faktor lingkungan sekolah, (4) faktor biaya sekolah, (5) faktor kegiatan humas sekolah, (6) faktor rencana diri, (7) faktor lokasi strategis, (8) faktor dukungan orang tua, (9) faktor kesesuaian jurusan, (10) faktor kebahagiaan batin, (11) faktor karyawan yang handal, (12) faktor perhatian orang tua. Ternyata dalam kondisi riilnya, faktor yang mempunyai kontribusi yang tinggi dalam

memotivasi siswa memilih SMKN 1 Pujon yaitu faktor menggapai cita-cita dan dukungan orang tua, faktor biaya sekolah, kesesuaian jurusan, kebahagiaan batin, karyawan yang handal, dan perhatian orang tua. Sedangkan faktor yang mempunyai kontribusi yang rendah yaitu faktor kondisi fisik sekolah, lingkungan sekolah, kegiatan humas sekolah, rencana diri dan lokasi strategis.

Penelitian Teguh Raharja (2010: 1) yang berjudul “Analisis Minat Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke Sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Malang” mengungkapkan hasil penelitiannya sebagai berikut, bahwasannya minat terbesar untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berasal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) reguler yang terdiri dari SMP negeri yang belum mendapat status Sekolah Standar Nasional (SSN) atau pun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sebesar 80,79 % dan SMP swasta sebesar 68,45 %. selanjutnya disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) SSN sebesar 52,30 % dan yang terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) SBI/RSBI sebesar 30,52 %. Ternyata dengan beragamnya jenis atau status sekolah yang ada sekarang ini juga mempengaruhi minat siswa untuk masuk pada suatu sekolah tertentu atau dapat dikatakan semakin tinggi status Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka semakin rendah minat siswanya untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan semakin rendah status Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka semakin tinggi minat siswanya untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dengan kata lain semakin tinggi

status sekolah Menengah Pertama (SMP) maka semakin tinggi minat siswanya untuk melanjutkan ke sekolah Menengah Atas (SMA) dan semakin rendah status Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka semakin rendah minat siswanya melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat terbit Rabu Kliwon 16 juni 2010 oleh KR-Agussutata dengan judul “Tidak Ingin Masuk Sekolah Favorit” adalah, Seorang murid kelas VI SDN Panjatan Kulonprogo yang bernama Heri Priyana peraih nilai UASBN 28,70 terdiri dari nilai Bahasa Indonesia 9,40, Matematika 9,75, dan IPA 9,75 berkaitan dengan motivasi memilih sekolah diberitakan siswa tersebut tidak ingin melanjutkan ke sekolah SMP favorit di Kota yang banyak diperebutkan banyak orang tua selain itu siswa tersebut juga tidak ikut dalam pendaftaran peserta didik baru di SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). “Ada tiga teman yang sudah diterima di RSBI. Melihat kemampuan orang tua, saya ingin melanjutkan ke SMP Panjatan seperti teman-teman lainnya. Jarak rumah dengan sekolah tidak jauh, dapat berangkat sendiri tanpa harus diantar orang tua”. Disampaikan Heri Priyana kepada KR di SDN Panjatan, Senin (14/6) dikutip pada pemberitaan tersebut. Ternyata berdasarkan pemberitaan tersebut siswa mempunyai motif dalam memilih sekolah yaitu melanjutkan sekolah ke SMP di daerahnya dengan sekolah SMP RSBI atau SMP Favorit adalah sama, perbedaannya hanya pada biaya pendidikan di kedua jenis sekolah tersebut lebih mahal dan tidak sesuai dengan perekonomian keluarganya serta

mempunyai keyakinan asalkan rajin belajar, melanjutkan ke SMP biasa juga dapat berprestasi.

Penelitian Ninik Sri Rahayu (2010: 1) yang berjudul “Motivasi Siswa SMU di Kotamadya Yogyakarta melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi” dengan hasil penelitiannya sebagai berikut, dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain : (1) Variabel-variabel motivasi yang terdiri dari kebutuhan fisiologis (X1), kebutuhan akan rasa aman (X2), kebutuhan sosial (X3), kebutuhan penghargaan (X4) dan kebutuhan aktualisasi diri (X5) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap motivasi siswa SMU di Kotamadya Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. (2) Secara parsial kebutuhan fisiologis (X1), kebutuhan rasa aman (X2), Kebutuhan sosial (X3) dan Kebutuhan aktualisasi diri (X5) berpengaruh signifikan terhadap motivasi siswa SMU melanjutkan pendidikan ke Perguruan tinggi. Sedangkan kebutuhan penghargaan (X4) tidak memiliki signifikansi pengaruh terhadap motivasi siswa SMU di Kotamadya Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. (3) Kebutuhan aktualisasi diri (X5) adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi motivasi siswa SMU di Kotamadya Yogyakarta untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan motivasi memilih sekolah ternyata dalam pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara statistik kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan aktualisasi diri secara individual berkontribusi signifikan terhadap motivasi siswa SMU melanjutkan pendidikan ke Perguruan tinggi,

sedangkan kebutuhan penghargaan tidak terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap motivasi siswa SMU untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

I. Kerangka Berpikir

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi suatu negara sebagai dasar pembangunan yang harus diutamakan dalam upaya pembangunan sektor-sektor lain. Indonesia merupakan salah satu Negara yang dalam undang-undang dasarnya mencantumkan pendidikan sebagai hak asasi manusia serta dalam hal mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah kesehatan dan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan hak-hak asasi manusia dan merupakan syarat bagi kemajuan suatu masyarakat atau Negara.

Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan obsesi sekolah sebagai daya tarik masyarakat maka SMA N 1 Kalasan yang dinilai oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional siap dan memiliki potensi, saat ini telah berstatus sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional bersama dengan sekolah lain yang ada di Indonesia. Program yang ditujukan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat setara dengan Negara-negara lain tersebut diselenggarakan karena dinilai mutu pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal. Agar maksud baik dari pemerintah pusat tersebut dapat diselenggarakan dengan sesuai aturan yang ada di sekolah dan diterima dengan baik oleh masyarakat maka diperlukan manajemen yang baik. Sekolah

perlu membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Adanya terobosan baru program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA N 1 Kalasan disikapi positif oleh masyarakat hal ini ditunjukkan dengan peningkatan animo pendaftar calon siswa pada saat penerimaan siswa baru. Orang tua memberikan arahan kepada putra-putrinya untuk masuk pada sekolah tertentu setelah mengetahui karakteristik dari sekolah tersebut, untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan terkait wawasan dan harapan masyarakat mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA N 1 Kalasan.